

Benturan Peradaban dan Relevansinya Kini: Suatu Refleksi Atas Tesis Samuel P. Huntington

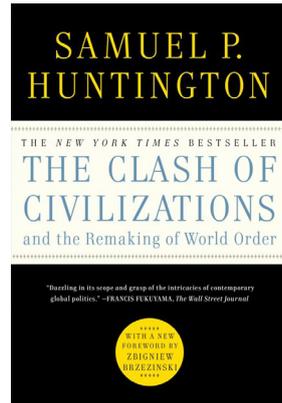
—
Lucke Haryo S.P

Penghujung abad ke-20 ditandai dengan suatu titik kritis bagi dinamika politik internasional. Konflik ideologi antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet selama setengah abad telah sampai pada titik akhirnya, ditandai dengan tamatnya Uni Soviet sebagai negara. Di hadapan titik penuh ketidakpastian ini, terbentang lembaran penuh kemungkinan akan wajah dunia berikutnya. Apakah ia akan diwarnai dengan perdamaian universal atau apakah ia akan menjadi saksi akan suatu gelombang konflik dengan wajah lain?

Pertanyaan inilah yang berusaha dijawab oleh Samuel P. Huntington melalui tesisnya akan benturan peradaban yang dimuat dalam bukunya dengan judul “The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order” di tahun 1996. Melalui tesis ini, ia berargumen bahwa konflik ideologi ala Perang Dingin akan digantikan dengan konflik kultural antar peradaban. Perbedaan kultural yang menjadi sumber konflik menurut Huntington akan bersifat lebih mengakar dan sulit terselesaikan dibandingkan dengan perbedaan ideologi, sehingga munculnya perdamaian demokratis pasca Perang Dingin tak lain hanyalah suatu bentuk kenaiifan kelompok elit tertentu.

Meskipun tesis benturan peradaban ini seringkali dianggap sekadar fiksi tak berdasar oleh beberapa pihak, jangka waktu selama hampir dua dekade memberikan kita kesempatan untuk mengunjungi kembali pokok-pokok pikiran Huntington. Dalam hal ini, terdapat beberapa poin yang cukup relevan dalam memahami dinamika politik internasional dewasa ini.

Pertama adalah kebangkitan agama dalam politik internasional. Huntington mengawali pembahasannya dengan menggarisbawahi keberadaan modernitas yang justru memperkuat kebangkitan agama. Dislokasi sosial yang disebabkan oleh modernitas justru menciptakan ruang untuk diisi oleh agama. Implikasi dari kebangkitan agama ini tentu tidak berhenti pada level individu, melainkan turut berdampak pada negara. Sebagai salah satu pembeda kultural yang penting, negara akan berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada negara dengan identitas agama yang sama, dan menjaga jarak dengan negara dengan identitas agama yang berbeda. Masuknya elemen agama dalam konsiderasi politik internasional ini juga turut memberdayakan kelompok-kelompok religius yang menggunakan agama sebagai alat mobilisasi massa.



Clash of Civilizations and the Remaking of World Order

oleh Samuel P. Huntington

Ditarik pada dewasa ini, kebangkitan agama dalam politik internasional tampak secara gamblang. Fundamentalisme agama antara lain menciptakan gelombang kekerasan dan terorisme yang belum juga surut. Selain itu, identifikasi negara pada agama turut menguat dengan tujuan untuk memperkuat identitas nasional. Fenomena ini dapat dilihat di berbagai negara Brazil dan Amerika Serikat dengan haluan Kristen Evangelikal; Turki di bawah Presiden Erdogan dengan identitas Islam ketimuran alih-alih Eropa; serta India yang tak lagi sungkan dengan retorika nasionalisme Hindu di bawah Perdana Menteri Narendra Modi. Partisipasi masyarakat dalam menentukan politik luar negeri yang sesuai dengan nilai keagamaan juga semakin terlihat, yang dalam kasus Indonesia diwakili oleh demonstrasi Front Pembela Islam (FPI) terhadap Kedutaan Besar Tiongkok dan India dalam dua kesempatan terpisah terkait dengan kebijakan dua negara tersebut terhadap minoritas muslim.

Kedua adalah sentralitas politik identitas dalam hubungan internasional. Dengan terhapusnya garis ideologi sebagai pembatas kerjasama antar negara, identitas akan menjadi penentu pola kerjasama antar negara. Kesamaan kultur akan mempermudah kerjasama, perbedaan akan menimbulkan kesukaran. Selain itu, negara juga akan berupaya untuk menjadi negara inti dari suatu peradaban melalui kebijakan-kebijakan yang melegitimasi posisi sentral negara tersebut dalam satu kelompok peradaban.

Prediksi Huntington ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana pola kerjasama negara, terutama regionalisme, pada dewasa ini amat bergantung terhadap pandangan atas kesamaan kultural. Uni Eropa yang menjadi contoh sukses regionalisme dalam beberapa tahun terakhir berada dalam ancaman disintegrasi menyusul keluarnya Inggris serta pembangkangan Polandia dan Hungaria terhadap Brussels menggarisbawahi perbedaan kultur antara Britannia vs Eropa Daratan dan Eropa Barat vs Eropa Timur. Di sisi lain, ASEAN masih menjadi contoh dari keberagaman kultural yang kontraproduktif secara politik. Terlebih di berbagai permasalahan seperti konflik perbatasan antar anggota, krisis Rohingya, dan perbedaan postur dalam menghadapi Tiongkok menjadi tengara ketidakharmonisan yang nyata. Pada aspek terakhir, dinamika hubungan antara Turki, Iran, dan Arab Saudi dapat dilihat sebagai upaya perebutan status sebagai negara inti dari peradaban Islam, dengan upaya legitimasi yang dilakukan dengan berebut pengaruh antar negara Islam di kawasan.

Terakhir, meskipun tulisannya diwarnai dengan pesimisme, bagian akhir tulisan Huntington menawarkan secercah optimisme akan potensi perpaduan peradaban. Ia menganjurkan bagi tiap-tiap peradaban untuk melakukan gencatan senjata peradaban dengan menghentikan proyek universalisasi peradaban ataupun pengadopsian peradaban lain dalam bentuk apapun. Sebagai gantinya, tiap peradaban harus berpegang pada prinsip peradaban yang partikuler dan dunia yang multiperadaban. Selain itu, perpaduan peradaban ala Huntington akan memerlukan solidifikasi garis antara peradaban, reformasi institusi internasional berdasarkan garis peradaban, serta

pencarian dan penekanan norma dan nilai yang pada sejatinya universal.

Pada titik ini perlu diakui bahwa apa yang dianjurkan oleh Huntington tak lain merupakan tugas Herkulean dalam dunia yang semakin terhubung kini. Keterhubungan ini selain menjadi motor penggerak kemakmuran kontemporer, juga turut memfasilitasi pembauran peradaban dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk memutus pembauran dan membangun tembok antar peradaban kemudian akan memerlukan pembatasan keterhubungan yang telah merajut satu kelompok dengan kelompok lain dalam suatu jaringan kasat mata. Lantas bukankah penyatuan peradaban dalam konteks ini menjadi potensi yang lebih layak alih-alih benturan peradaban?

Lucke Haryo S. P

Librarian at Institute of International Studies

lucke.h@mail.ugm.ac.id

Institute of International Studies (IIS) is a research institute under the Department of International Relations, Universitas Gadjah Mada, whose purpose is to advance the study of International Relations by carrying out a comprehensive and broad research program. Founded in 2010, IIS provides analysis on current issues, conceptually and policy-wise, thematic databases, consultations and recommendations, aimed at policymakers, research communities, media and interested public. In addition, IIS also engage in advocacy and campaigning activities on various issues in accordance with its mission.

iis.fisipol.ugm.ac.id



 facebook.com/IISUGM

 @kop9057g

 [iis_ugm](https://www.instagram.com/iis_ugm)

 [iis_ugm](https://twitter.com/iis_ugm)

for more information about this review, please contact:
IIS Publication Division
publication.iis@ugm.ac.id